

## Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Keuangan Desa Sebagai Variabel Mediasi Di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

Sulfiana<sup>1</sup>, Mursalim<sup>2</sup>, Muh. Su'un<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

<sup>2,3</sup>Dosen Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar

[sulfiana@gmail.com](mailto:sulfiana@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem keuangan desa sebagai *variable mediasi* di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dengan menggunakan teknik sampel sensus. Populasi adalah seluruh kantor desa yang ada di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sebanyak 11 desa, sedangkan sampel yang diambil adalah perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan Desa, Kepala Seksi, dan perangkat BUMDes (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) yang berjumlah 132 responden yang masing-masing desa diambil sebanyak 12 responden. Hasil kuesioner tersebut telah di uji validitas dan reliabilitasnya, juga telah diuji asumsi klasik berupa asumsi normalitas, asumsi multikolonieritas, dan asumsi heterokedastisitasnya. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan system keuangan desa memediasi pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Kata Kunci: Kapasitas Aparatur Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Sistem Keuangan Desa.

### ABSTRACT

This study aims to determine the effect of village apparatus capacity on village fund management accountability with the village financial system as a mediating variable in Tellulimpoe District, Sinjai Regency. Collecting data using primary data obtained from questionnaires using the census sample technique. The population is all village offices in Tellulimpoe District, Sinjai Regency as many as 11 villages, while the samples taken are village officials consisting of the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Head of Village Affairs, Section Head, and BUMDes apparatus (Chairman, Secretary and Treasurer) totaling 132 respondents from each village taken as many as 12 respondents. The results of the questionnaire have been tested for validity and reliability, and classical assumptions have been tested in the form of normality assumptions, multicollinearity assumptions, and heteroscedasticity assumptions. The analytical method used is multiple regression. The results show that the capacity of the village apparatus has a positive and significant effect on the accountability of village fund management and the village financial system mediates the effect of the capacity of the village apparatus on the accountability of village fund management in Tellulimpoe District, Sinjai Regency.

Keywords: Village Apparatus Capacity, Village Fund Management Accountability, Village Financial System.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Di masa sekarang ini untuk meningkatkan pembangunan nasional di Indonesia secara merata, pemerintah pusat melakukan berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya dengan menyerahkan langsung tanggungjawab kepada pemerintah Desa di setiap daerah untuk membangun masing-masing Desa tempat aparat Desa bertugas. Salah satu bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah Desa, yaitu dengan memberikan kewenangan untuk mengelola dana Desa masing-masing Desa.

Pemerintah Desa diberikan tanggungjawab dikarenakan pemerintah pusat tidak dapat menjangkau semua daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dengan diberikannya pemerintah Desa kewenangan untuk mengelola dana Desa, maka akan memudahkan tercapainya program pembangunan nasional secara merata, karena pemerintah Desa dapat melihat apa saja yang perlu dibangun dan siapa saja yang perlu dibantu sehingga anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

Diberikannya pemerintah Desa kewenangan untuk mengelola dana Desa tersebut membuat pemerintah Desa juga diwajibkan untuk melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa dalam mengelola/merealisasikan anggaran dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa yang sering disebut sebagai laporan pertanggungjawaban.

Dana desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukan bagi Desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk penyaluran dana Desa pada tahun 2021 sebesar Rp 72 Triliun yang diperuntukkan bagi 74.961 Desa di seluruh Indonesia, di mana setiap Desa mendapatkan anggaran sebesar Rp 960.500.000,00. Jika dilihat dari nominal anggaran dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, maka dapat dilihat bahwa pemerintah pusat sangat serius untuk membangun Desa, sehingga masyarakat dapat menikmati secara langsung dampak dari pembangunan tersebut.

Di samping keseriusan pemerintah pusat untuk membangun Desa secara serius dengan menyalurkan dana Desa dengan jumlah besar dan memberikan wewenang kepada Pemerintah Desa untuk mengelola dana tersebut, ada saja pihak yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan dengan menyalahgunakan anggaran tersebut. Seperti beberapa kasus yang di temukan oleh peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam 6 tahun terakhir.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana desa, hal itu disampaikan oleh peneliti ICW Kurnia Ramadhan karena hasil penelitian yang dilakukan menemukan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat/perangkat Desa. Berdasarkan data yang ditemukan oleh ICW, sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 terdapat 676 terdakwa atas kasus korupsi dari perangkat/aparat Desa. Data tersebut menunjukkan bahwa

praktik korupsi kebanyakan dilakukan oleh perangkat Desa setelah Aparatur Negeri Sipil (ASN) dan pihak swasta. Kerugian negara yang di dapatkan oleh peneliti ICW Kurnia sebesar Rp 111 miliar selama 6 tahun terakhir. [Kompas.com, \(2021\)](#).

Seperti pada kasus di Desa Lamatti Riawang, Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, dimana Kepala Desa MA dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta, terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan dana desa sebesar Rp 439 juta. Dana tersebut digunakan tidak sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh MA dibuat tidak sesuai dengan realisasi anggaran tetapi hanya berdasarkan rencana anggaran biaya. ([Kompas.com](#))

Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat bahwa banyaknya aparatur/perangkat Desa yang melakukan penyelewengan dana Desa. Kejadian tersebut karena pemerintah Desa tidak menerapkan dan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Akuntabilitas pengelolaan dana Desa adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada pemerintah Daerah atas seluruh kegiatan yang dilakukan meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk mendorong tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana Desa ada beberapa faktor yang harus di perhatikan, seperti kapasitas aparatur Desa dan Sistem keuangan Desa.

Kapasitas aparatur Desa adalah kemampuan pemerintah/staf Desa dalam membantu kepala Desa untuk menjalankan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Desa. Aparatur Desa yang memiliki kemampuan atau daya serap yang tinggi dalam mengelola dana Desa yang telah dialokasikan/dianggarkan sesuai kegiatan selama satu periode akan membuat aparatur Desa lebih transparan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat mewujudkan tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa kapasitas aparatur Desa akan membuat akuntabilitas pengelolaan dana Desa tercapai.

Hasil penelitian terdahulu, [Arief Mufti \(2021\)](#) melakukan penelitian di Kabupaten Wonogiri dengan hasil penelitiannya membuktikan bahwa kapasitas aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Umaira dan Adnan \(2019\)](#) melakukan penelitian di Kabupaten Aceh Barat Daya, Nur dan Sawitri (2019) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh [Deva I Made, ddk \(2017\)](#) melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng, menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan sistem keuangan Desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Nityantari, dkk \(2019\)](#) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem keuangan desa. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh [Widyatama dan Novita \(2017\)](#) yang menemukan bahwa kompetensi dari aparatur Desa secara signifikan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana Desa.

Faktor selanjutnya, yaitu sistem keuangan Desa. Sistem keuangan Desa adalah satu kesatuan komponen pengelolaan dana Desa baik dari segi realiasi anggaran maupun anggaran pendapatan belanja Desa. Sistem keuangan Desa merupakan alat bagi pemerintah Desa dalam pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu melakukan pelaporan keuangan Desa. Sistem keuangan Desa sendiri dirancang untuk memudahkan aparat Desa dalam merancang dan melakukan pelaporan.

Hasil penelitian terdahulu, [Arief Mufti \(2020\)](#) melakukan penelitian di Kabupaten Wonogiri dengan hasil penelitiannya membuktikan bahwa sistem keuangan Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Arief Arfiansyah \(2021\)](#) melakukan penelitian di Kabupaten Wonogiri menemukan bahwa sistem keuangan Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Namun, hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh [Putu Luh Pratiwi \(2021\)](#) melakukan penelitian di Desa Sekecamatan UBUD yang menemukan bahwa sistem keuangan Desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa.

Sistem keuangan Desa dapat berjalan dengan lancar apabila diimbangi dengan tingginya kapasitas aparatur Desa. Untuk meningkatkan kapasitas yang dimiliki oleh aparatur Desa maka perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan terhadap sistem keuangan tersebut.

Penelitian ini akan dilakukan di kantor Desa yang ada di kabupaten Sinjai. Alasan peneliti memilih pemerintah Desa sebagai objek penelitian dikarenakan beberapa tahun terakhir ini terdapat banyak kasus korupsi yang melibatkan para pemerintah/aparat Desa.

Pemerintah Desa sendiri diartikan sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola wilayah tingkat Desa. Pemerintah Desa sendiri di atur dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang pemerintah Desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 216 (1) tentang pemerintah Daerah.

**Tabel 1: Rumusan dan Tujuan Penelitian**

Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian
1. Apakah kapasitas aparatur Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai? 2. Apakah sistem keuangan Desa memediasi pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai?	1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kapasitas aparatur Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem keuangan Desa memediasi pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Grand Teori

#### Teori Stewardship

Konsep teori stewardship memberikan gambaran manajemen perusahaan yang memiliki tugas dalam mengelola aset perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya sekaligus bertanggungjawab kepada pemilik [Arief Muh, \(2021\)](#). Teori stewardship memberikan sebuah asumsi tentang sifat manusia yaitu dapat dipercaya, bertanggungjawab, jujur serta memiliki integritas atas setiap aktivitas yang dilakukannya. Berdasarkan teori stewardship menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Keberhasilan organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas steward dan prinsipal.

#### Teori Technology Acceptance Model

Model penerimaan teknologi (Technology Acceptance Model, TAM) merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. Teori Technology Acceptance Model memberikan sebuah asumsi tentang bagaimana sebuah teknologi dapat bermanfaat bagi sumber daya manusia dalam melakukan tugasnya sehingga tugas yang dijalankan memiliki hasil yang lebih efektif dan efisien. Implikasi teori TAM dalam penelitian ini yaitu bagaimana system keuangan desa dapat mempermudah pekerjaan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa, mulai dari perencanaan sampai membuat laporan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang dilakukan selama periode akuntansi, dengan adanya system keuangan desa akan mempermudah aparatur desa dalam mewujudkan terbentuknya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### Tinjauan Teori

#### Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah suatu bentuk pertanggungjawaban aparat desa kepada pihak yang memberi wewenang (pemerintah daerah) untuk mengelola dana desa tersebut, dimana masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui fakta terkait dengan apa yang dikerjakan oleh aparat desa dalam mengelola dana desa. Variabel akuntabilitas pengelolaan dana Desa diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator yang di peroleh dari [Zeyn \(2011\)](#). Indikator yang digunakan, yaitu perumusan rencana keuangan, pelaksanaan dan kegiatan pembiayaan, pelaksanaan pelaporan keuangan, melakukan evaluasi atas kinerja keuangan.

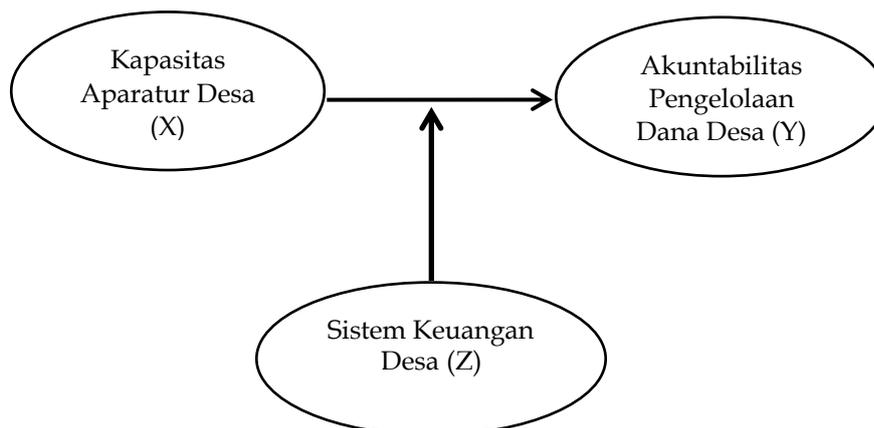
#### Kapasitas Aparatur Desa

Kapasitas aparatur desa adalah kemampuan yang dimiliki oleh aparat desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu Kepala Desa dalam membangun sebuah desa tempat beliau bertugas. Untuk meningkatkan kapasitas dari aparatur desa kepala desa sebaiknya sering mengikutsertakan para aparat desa dalam berbagai pelatihan sesuai kebutuhan, terutama pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Variabel kapasitas aparatur desa diukur dengan menggunakan 5 (lima) indikator yang di peroleh dari [Wayan I dan Ni Komang \(2021\)](#). Indikator yang digunakan yaitu pemahaman, keahlian teknis, pelatihan, inisiatif dalam bekerja, serta kode etik kepegawaian.

### Sistem Keuangan Desa

Sistem keuangan Desa adalah serangkaian aplikasi atau komponen yang saling berkaitan terkait hak dan kewajiban pemerintah Desa yang berkaitan dengan uang terkait pelaksanaan hak dan kewajiban atas pendapatan dan belanja Desa. Variabel sistem keuangan Desa diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator yang diperoleh dari Attatir (2017). Indikator yang digunakan yaitu kemudahan, risiko, fitur layanan, dan pemanfaatan pengguna perangkat lunak aplikasi.

Hubungan antara variabel-variabel tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Penyelidikan didasarkan pada hipotesis berikut:

H1 : Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

H2 : Sistem keuangan desa memediasi pengaruh kapasitas aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yakni kuantitatif dengan pendekatan penelitian yaitu deskriptif dengan menggunakan data primer, data yang diperoleh melalui pembagian kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Desa yang ada di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang berjumlah 11 Desa sebanyak 12 aparat. Sampel dalam penelitian ini sampel dipilih dengan sensus. Metode sensus adalah metode pengambilan sampel secara terstruktur tentang jumlah dari sebuah populasi yaitu: perangkat Desa yang terdapat di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sebanyak 132 orang. Masing-masing Desa diambil 12 perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan Desa, Kepala Seksi, dan perangkat BUMDes (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara).

### Metode Analisis

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, multikolonieritas, dan heterokedastisitas), analisis deskriptif serta analisis linear berganda. Adapun model persamaan regresinya, yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 X.Z + \epsilon$$

Dimana:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

a = Koefisien intercept (kostanta), yaitu nilai Y jika seluruh variabel lain adalah nol

- $\beta_1, \beta_2$  = Koefisien regresi
- X = Kapasitas Aparatur Desa
- Z = Sistem Keuangan Desa
- $\epsilon$  = error term (residual)

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Uji Validitas dan Reliabilitas

##### Uji Validitas

Berikut rincian uji validitas yang meliputi dari tiga variabel :

Variabel		r hitung	Keterangan
Kapasitas Aparatur Desa (X)	1	0,836	Valid
	2	0,790	Valid
	3	0,640	Valid
	4	0,817	Valid
	5	0,889	Valid
	6	0,800	Valid
	7	0,787	Valid
	8	0,664	Valid
	9	0,815	Valid
	10	0,854	Valid
	11	0,740	Valid
	12	0,849	Valid
AKuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	1	0,759	Valid
	2	0,835	Valid
	3	0,701	Valid
	4	0,777	Valid
	5	0,814	Valid
	6	0,716	Valid
	7	0,639	Valid
	8	0,629	Valid
	9	0,633	Valid
	10	0,814	Valid
	11	0,779	Valid
	12	0,789	Valid
	13	0,558	Valid
	14	0,574	Valid
	15	0,543	Valid
	16	0,643	Valid
	17	0,355	Valid
Sistem Keuangan Desa (Z)	1	0,669	Valid
	2	0,674	Valid
	3	0,596	Valid
	4	0,704	Valid
	5	0,683	Valid
	6	0,644	Valid
	7	0,670	Valid
	8	0,585	Valid
	9	0,649	Valid
	10	0,521	Valid
	11	0,582	Valid
	12	0,517	Valid
	13	0,604	Valid
	14	0,737	Valid

	15	0,715	Valid
	16	0,744	Valid
	17	0,725	Valid
	18	0,630	Valid
	19	0,642	Valid

Sumber: Output SPSS 23.0 for Windows berdasarkan hasil penelitian 2022

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan kuesioner baik dari variabel kapasitas aparatur desa (X), akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), dan system keuangan desa (Z) memiliki nilai koefisien  $\geq 0,30$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan dalam kuesioner dianggap valid dan dapat dianjurkan untuk pengolahan data selanjutnya.

### Uji Reliabilitas

Hasil dari pengujian reliabilitas data untuk variabel kapasitas aparatur desa (X), akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), dan system keuangan desa(Z) dalam penelitian ini dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3 Hasil Pengujian Reliabilitas Data untuk Variabel X, Y, dan Z

Variabel	Koefisien Reliabilitas ( $\alpha$ )	Nilai Batas Alpha ( $\alpha$ )	Keputusan
Kapasitas Aparatur Desa (X)	0,963	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,957	0,60	Reliabel
Sistem Keuangan Desa (Z)	0,944	0,60	Reliabel

Sumber: Output SPSS 23.0 for Windows berdasarkan hasil penelitian 2019

Berdasarkan data pada tabel 3 menunjukkan bahwa angka-angka dari nilai Cronbach Alpha ( $\alpha$ ) pada variabel independen maupun dependen menunjukkan bahwa besaran diatas nilai 0,60. Hal ini berarti bahwa seluruh pernyataan di dalam kuesioner adalah reliable atau menunjukkan keandalan dalam mengukur variabel-variabel dalam model penelitian,

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Hasil uji normalitas Kolmogrov-Smirnov dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Hasil Pengujian Normalitas Kolmogrov-Smirnov  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.54645015
Most Extreme Differences	Absolute	.159
	Positive	.061
	Negative	-.159
Test Statistic		.159
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Output SPSS 23.0 for Windows berdasarkan hasil penelitian 2022

Berdasarkan tabel 4 hasil pengujian normalitas Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200, nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini telah memenuhi syarat normalitas atau dengan kata lain variabel dependen dan independen telah berdistribusi normal.

### Uji Multikolonieritas

Hasil pengujian multikolonieritas pada dua variabel independen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Hasil Pengujian Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kapasitas Aparatur Desa	.558	1.791
Sistem Keuangan Desa	.558	1.791

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Output SPSS 23.0 for Windows berdasarkan hasil penelitian 2022

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa model regresi bebas dari multikolonieritas atau kedua variable independen tidak memiliki korelasi dengan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari nilai VIF yang tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance yang melebihi 0,1.

### Uji Heterokedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas pada dua variabel independen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Hasil Penelitian Heteroskedastisitas

Model	Sig.
1 (Constant)	.001
Kapasitas Aparatur Desa	.130
Sistem Keuangan Desa	.667

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 17 menunjukkan bahwa residual (error) yang muncul dalam persamaan regresi untuk variabel kapasitas aparatur desa, system keuangan desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa mempunyai varians yang sama karena hasil pengujian untuk regresi variabel tersebut dengan harga mutlak dari residual (*error*) tidak signifikan ditunjukkan oleh p-value (sig)  $\geq 0,05$ , yaitu untuk variabel kapasitas aparatur desa sebesar 0,130 dan untuk variabel system keuangan desa sebesar 0,667 dengan demikian pengujian regresi dapat dilanjutkan.

### Analisis Statistik Berganda

Pada penelitian ini, digunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan satu variabel dependen dan tiga variabel independen.

**Tabel Hasil pengujian Regresi Linear Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27.986	1.896		14.762	.000
Kapasitas Aparatur Desa	.272	.072	.211	3.788	.000
KAD. SKD	.007	.001	.780	14.013	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Output SPSS 23.0 for Windows berdasarkan hasil penelitian 2019

Berdasarkan data pada tabel 20 diketahui nilai koefisien regresi kapasitas aparatur desa (X) dan kapasitas aparatur desa x system keuangan desa (X.Z) dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) masing-masing sebesar 0,272 (X), 0,007 (X.Z), dan nilai konstanta sebesar 27,986. Dengan demikian terbentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 27,986 + 0,272 X + 0,007 X.Z$$

Model ini menunjukkan bahwa koefisien regresi hasil taksiran bertanda positif. Hasil ini memberikan gambaran bahwa adanya hubungan positif dari variabel kapasitas aparatur desa, system keuangan desa dan kapasitas aparatur desa x sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berarti bahwa semakin tinggi kapasitas aparatur desa, system keuangan desa dan kapasitas aparatur desa dengan system keuangan desa sebagai variabel mediasi maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Persamaan regresi tersebut memberikan pengertian bahwa variabel kapasitas aparatur desa (X) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,272 berarti bahwa apabila kapasitas aparatur desa naik sebesar 1%, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami peningkatan sebesar 0,272% pada saat variabel bebas lainnya tidak berubah (konstan) dan variabel kapasitas aparatur desa dengan sistem keuangan desa sebagai variabel mediasi memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,007 berarti apabila sistem keuangan desa dengan kapasitas aparatur desa meningkat 1%, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami peningkatan sebesar 0,007% pada variabel bebas lainnya tidak berubah (konstan).

### Analisis Pengujian Hipotesis

#### Uji Parsial (Uji t)

Untuk menguji apakah kapasitas aparatur desa secara parsial berpengaruh terhadap sistem keuangan desa dan kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, maka dilakukan uji t (uji *student*).

**Tabel Output t<sub>hitung</sub> pada coefficient**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27.986	1.896		14.762	.000
Kapasitas Aparatur Desa	.272	.072	.211	3.788	.000
KAD . SKD	.007	.001	.780	14.013	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Output SPSS 23.0 for Windows berdasarkan hasil penelitian 2022

1) Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Kapasitas aparatur desa sebesar 3,788 lebih besar dari t<sub>tab</sub> 1,985 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, maka pada tingkat kekeliruan 5% H<sub>a</sub> diterima dan H<sub>0</sub> di tolak. Dengan demikian hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima/terbukti. Artinya tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Yang artinya bahwa apabila aparat desa memiliki pahaman, kemampuan teknis serta mendapatkan pelatihan terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengelola keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, maka akan mewujudkan tercapainya suatu akuntabilitas pengelolaan dana desa, meskipun aparat desa kurang inisiatif dalam bekerja serta kurang mengedepankan etika dan kode etik dalam melakukan tugasnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penjelasan diatas terkait dengan teori *stewardship*, dimana aparat desa yang diberi tanggungjawab dalam mengelola keuangan desa berhak melakukan pertanggungjawaban atas apa yang dikelolanya kepada pemerintah pusat (Kabupaten/Kota) serta kepada masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dihasilkan oleh Arief Mufti (2021) melakukan penelitian di Kabupaten Wonogiri dengan hasil penelitiannya membuktikan bahwa kapasitas aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa, Umaira dan Adnan (2019) melakukan penelitian di Kabupaten Aceh Barat Daya, serta Nur dan Sawitri (2019) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Akan tetapi hasil penelitian ini memperlemah penelitian yang dilakukan oleh Widyatama (2017) yang menemukan bahwa kompetensi dari aparat desa secara signifikan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolan alokasi dana desa.

2) Sistem Keuangan Desa Memediasi Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Sistem keuangan desa memediasi pengaruh kapasitas aparatur desa sebesar 14,013 lebih besar dari t<sub>tab</sub> 1,985 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, maka pada tingkat kekeliruan 5% H<sub>a</sub> diterima dan H<sub>0</sub> di tolak. Dengan demikian hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima/terbukti. Artinya tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa sistem desa memediasi pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Hal tersebut menandakan bahwa dengan adanya system keuangan desa dapat memperkuat pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pelaksanaan pelaporan keuangan menunjukkan bahwa sistem keuangan desa memediasi pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, dapat dilihat bahwa

meskipun sistem keuangan desa telah ada untuk membantu aparat desa dalam menyelesaikan tugasnya, akan tetapi apabila aparat desa tidak memiliki kualitas yang baik maka sistem tersebut tidak dapat dijalankan sehingga laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan akan terlambat, dan hal tersebut dapat menyebabkan tidak tercapainya suatu akuntabilitas pengelolaan dana desa, begitupun sebaliknya dengan adanya system keuangan desa maka akan meningkatkan kapasitas yang dimiliki oleh aparat desa, sehingga hasil laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan oleh aparat desa terkait dengan pengelolaan dana desa selama periode berjalan akan cepat selesai dengan hasil yang lebih akurat, dengan adanya system tersebut sangat mempermudah aparat desa dalam mengelola keuangan desa, mulai dari proses perumusan rencana keuangan hingga pertanggungjawaban. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan desa memperkuat pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Hasil ini sejalan dengan penjelasan terkait teori TAM, dimana sebuah teknologi (system keuangan desa) dapat membantu sumber daya manusia (aparatur desa) dalam melakukan pengelolaan dana desa secara efektif dan efisien, mulai dari proses perumusan rencana keuangan hingga pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang dilakukan selama periode berjalan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Muh (2021) yang menemukan bahwa system keuangan desa memediasi kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai dengan system keuangan desa sebagai variabel mediasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai. Hal ini berarti bahwa jika aparatur desa memiliki kapasitas/kualitas yang baik maka akan mewujudkan tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diinginkan.
2. System keuangan desa memediasi pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa sistem keuangan desa memperkuat pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan penulis yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk para aparat desa untuk meningkatkan inisiatif dalam bekerja untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab yang diberikan, meskipun pemberi tanggungjawab tidak mendesak untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban yang diberikan, sertameningkatkan pemahaman terkait bagaimana kode etik tentang kepegawaian.

2. Diharapkan untuk kepala desa selalu mengikutsertakan para aparat desa dalam pelatihan terkait dengan bagaimana siklus akuntansi pemerintah desa yang baik dan benar, sehingga aparat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana desa dapat disusun dengan baik.
3. Diharapkan untuk pemerintah agar system keuangan desa dibuat dengan fitur layanan yang lengkap dan mudah dipahami oleh para aparat desa, serta lebih meningkatkan keamanan system tersebut dari risiko yang akan dihadapi.
4. Diharapkan untuk kepala desa dan seluruh aparat desa untuk selalu mengikutsertakan masyarakat yang tidak memiliki jabatan/wewenang di pemerintah desa dalam proses pengelolaan dana desa sehingga dana desa yang dikelola akan lebih transparan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Mufti. 2020. Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal of Islamic Finance*. Vol 3, Nomor 1. Surakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri.
- Deva, I Made, dkk. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Studi pada Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi*. Vol 8, Nomor 1. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Kompas.com.2021.[https://amp.kompas.com/regional/read/2020/08/28/16385591/korupsi-dana-desa-kades-lamatti-riawang-sinjai-dituntut-4-tahun-penjara#aoh=16388726580523&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%251%24s](https://amp.kompas.com/regional/read/2020/08/28/16385591/korupsi-dana-desa-kades-lamatti-riawang-sinjai-dituntut-4-tahun-penjara#aoh=16388726580523&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s)
- Kompas.com. 2021. [https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all&conn=1\\*12wfh5a\\*other\\_jxampid\\*azU1Wk94YWtCVUxwY29oQ1F2N1FLeXM2bTc0SHBuMXNFNDJLbjzMNbmtNODIxYXFzOEU2bBE5TGFFUmRxQg...#page2](https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all&conn=1*12wfh5a*other_jxampid*azU1Wk94YWtCVUxwY29oQ1F2N1FLeXM2bTc0SHBuMXNFNDJLbjzMNbmtNODIxYXFzOEU2bBE5TGFFUmRxQg...#page2)
- Nur, Muhammad Aziz dan Sawitri. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Himepage*. Vol 6, Nomor 2, Hal 280-344. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Nur, Pratiwi dan Yuwita, 2020. Analisis Penggunaan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol 20, Nomor 20. Hal 217-223. Surakarta: STIE AAS Surakarta Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang pemerintah Desa Pasal 68 Ayat 1.
- Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang pemerintah Desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 216 (1) tentang pemerintah Daerah.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Putu, Luh Pratiwi. 2021. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Se-Kecamatan UBUD). Hita Akuntansi dan Keuangan. e-ISSN 2798-8961. Bali: Universitas Hindu Indonesia
- Umaira, Siti dan Adnan. 2019. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol 4, Nomor 3. Aceh: Program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.
- Zeyn, E. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan*. Vol 1, Nomor 1, Hal 21-37.